

Model Kewirausahaan Sosial Petani melalui Pembentukan Koperasi Usaha Bersama (KUB) Pupuk Berbasis Gotong Royong

Asep Andang¹, Firmansyah Maulana Sugiaartana Nursuwars², Rahmi Nur Shofa³, Muhammad Adi Khairul Anshary⁴, Neng Ika Kurniati⁵

¹ Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Siiwangi, Tasikmalaya, Indonesia

^{2,4,5} Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Siiwangi, Tasikmalaya, Indonesia

³ Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Siiwangi, Tasikmalaya, Indonesia

² email: firansyah@unsil.ac.id

Naskah Masuk : [27-09-2025]

Revisi Terakhir: [18-11-2025]

Diterbitkan : [31-12-2025]

Abstract- Smallholder farmers face serious challenges in accessing subsidized fertilizers due to scarcity, uneven distribution, and the high price of non-subsidized fertilizers. This condition is also experienced by the Sawargi Farmer Group in Ancol II Hamlet, Sindangkasih Village, Ciamis Regency, leading to increased production costs and reduced farm profits. This community service program aims to build farmers' independence through the establishment of a Farmer Cooperative (Koperasi Usaha Bersama/KUB) for fertilizers based on the local value of *gotong royong* (mutual cooperation) as a model of social entrepreneurship. The implementation method consists of five stages: socialization, institutional management training, cooperative legalization assistance, facilitation of access to non-subsidized fertilizer distributors, and evaluation with sustainability planning. The results indicate that the KUB was successfully established as a legal and functional institution, members experienced improvements in managerial capacity, a transparent governance system has begun to be implemented, and *gotong royong* values were integrated into institutional practices. Program outputs achieved to date include Intellectual Property Rights (copyright granted), a submitted national journal article, a published video, and a drafted mass media article. These findings demonstrate that integrating technical approaches with socio-cultural values can produce a sustainable farmer economic institution model, which can be replicated in other regions with similar characteristics.

Keywords:

social entrepreneurship; farmer cooperative; non-subsidized fertilizer; mutual cooperation; farmer institution.

Kata Kunci:

kewirausahaan sosial; koperasi usaha bersama; pupuk non-subsidi; gotong royong; kelembagaan petani.

Abstrak- Petani kecil menghadapi tantangan serius dalam akses terhadap pupuk bersubsidi yang semakin langka, distribusi yang tidak merata, dan harga pupuk non-subsidi yang tinggi. Kondisi ini juga dialami oleh Kelompok Tani Sawargi di Dusun Ancol II, Desa Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, yang berdampak pada peningkatan biaya produksi dan menurunnya keuntungan usahatani. Program pengabdian ini bertujuan membangun kemandirian petani melalui pembentukan Koperasi Usaha Bersama (KUB) pupuk berbasis nilai gotong royong sebagai model kewirausahaan sosial. Metode pelaksanaan meliputi lima tahapan, yaitu sosialisasi, pelatihan manajemen kelembagaan, pendampingan legalisasi koperasi, fasilitasi akses ke distributor pupuk non-subsidi, serta evaluasi dan perencanaan keberlanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa KUB berhasil terbentuk secara legal dan fungsional, anggota kelompok mengalami peningkatan kapasitas manajerial, sistem tata kelola koperasi berbasis transparansi mulai diimplementasikan, serta nilai gotong royong terintegrasi dalam praktik kelembagaan. Capaian luaran program hingga tahap ini meliputi HaKI (granted), artikel jurnal nasional (submitted), video kegiatan (published), dan artikel media massa

(draft). Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi pendekatan teknis dan sosial-budaya mampu menghasilkan model kelembagaan ekonomi petani yang berkelanjutan dan dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa.

I. PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sektor strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam menjamin ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Di tengah dinamika perubahan kebijakan pupuk bersubsidi dan tantangan globalisasi pertanian, petani sebagai aktor utama mengalami tekanan dalam hal produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani. Salah satu tantangan paling nyata yang dihadapi petani saat ini adalah keterbatasan akses terhadap pupuk bersubsidi yang semakin langka, kuotanya menurun, dan distribusinya tidak merata. Kondisi ini berdampak langsung pada biaya produksi, pengelolaan lahan, dan hasil panen, terutama bagi petani kecil yang bergantung pada pupuk untuk meningkatkan kesuburan tanah dan hasil produksi [1], [2].

Kondisi serupa dialami oleh Kelompok Tani Sawargi, yang berlokasi di Dusun Ancol II, Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Kelompok tani ini terdiri dari petani kecil yang secara turun-temurun menggantungkan hidup dari sektor pertanian tanaman pangan, terutama padi dan palawija. Wilayah Sindangkasih dikenal sebagai salah satu sentra pertanian di Kabupaten Ciamis dengan topografi relatif datar dan kondisi agroklimat yang mendukung sistem tanam intensif dua hingga tiga kali setahun. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, petani di daerah ini menghadapi persoalan pelik terkait keterbatasan pupuk subsidi, yang mengakibatkan biaya produksi meningkat dan ketergantungan pada pasar pupuk umum tidak dapat dihindari [3].

Kelangkaan pupuk bersubsidi tidak hanya mempersulit petani dalam mengakses sarana produksi yang terjangkau, tetapi juga menimbulkan potensi konflik sosial di tingkat lokal karena distribusi yang tidak merata dan adanya praktik percaloan. Sementara itu, pupuk non-subsidi yang tersedia di pasar umum memiliki harga yang relatif tinggi dan tidak selalu tersedia dalam jumlah dan jenis yang dibutuhkan [4], [5]. Petani sering kali terpaksa membeli pupuk eceran dalam kemasan kecil dengan harga satuan yang jauh lebih mahal. Hal ini menyebabkan ketidakefisienan dalam sistem usaha tani yang pada akhirnya menekan margin keuntungan petani.

Di sisi lain, kelompok tani Sawargi menunjukkan potensi sosial dan kelembagaan yang menjanjikan untuk dikembangkan. Kelompok ini memiliki struktur organisasi yang aktif, relasi sosial antar anggota yang erat, serta semangat gotong royong yang masih kuat dalam praktik kehidupan sehari-hari. Sebagian besar anggota kelompok merupakan petani milik sendiri dengan skala lahan kecil (rata-rata di bawah 0,5 hektar), namun memiliki pengalaman bertani yang cukup panjang [6]. Dalam diskusi-diskusi yang dilakukan bersama kelompok, muncul kesadaran kolektif tentang pentingnya membentuk kelembagaan ekonomi petani yang mandiri dan berorientasi jangka panjang sebagai strategi bertahan dalam menghadapi dinamika pertanian modern [7].

Melalui pemetaan partisipatif dan pendekatan dialogis, ditemukan bahwa para anggota kelompok tani Sawargi memiliki keinginan untuk membentuk Koperasi Usaha Bersama (KUB) sebagai wadah ekonomi yang mampu menyediakan pupuk non-subsidi dengan harga yang lebih kompetitif dan mekanisme distribusi yang adil [8]. Gagasan ini muncul dari pengalaman

bersama bahwa pembelian pupuk secara kolektif dalam jumlah besar dapat menurunkan biaya pembelian dan memperkuat posisi tawar terhadap distributor. Selain itu, KUB diharapkan mampu menjadi entitas yang tidak hanya fokus pada penyediaan pupuk, tetapi juga merambah ke sektor lain seperti distribusi benih, pemasaran hasil pertanian, hingga penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) di masa mendatang [9].

Dalam praktiknya, pembentukan KUB tidak dapat dilakukan secara instan. Diperlukan proses pendampingan yang sistematis dan terencana, mulai dari penguatan kapasitas organisasi kelompok, pelatihan manajemen usaha dan keuangan, pendampingan dalam pengurusan legalitas dan perizinan, hingga strategi penyusunan rencana bisnis (business plan) yang realistis dan aplikatif [10]. Selain itu, KUB yang akan dibentuk juga harus memiliki sistem tata kelola yang akuntabel, transparan, dan partisipatif agar mampu membangun kepercayaan dari seluruh anggota dan mitra eksternal [11].

Situasi ini menjadi titik tolak dirumuskannya program pengabdian kepada masyarakat yang berjudul *“Pendampingan Kelompok Tani dalam Membangun Usaha Pupuk Mandiri melalui KUB Berbasis Nilai Gotong Royong”*. Program ini bertujuan untuk menjawab permasalahan krusial yang dihadapi mitra, yaitu ketidakmampuan mengakses pupuk secara berkelanjutan, lemahnya kelembagaan ekonomi petani, serta belum adanya mekanisme usaha kolektif yang berbasis nilai lokal. Pendampingan ini tidak hanya berorientasi pada pembentukan kelembagaan secara administratif, melainkan juga pada penguatan nilai-nilai sosial seperti kebersamaan, kepercayaan, dan keadilan distribusi sebagai fondasi utama dalam menjalankan KUB secara berkelanjutan [12].

Selain itu, pengabdian ini secara eksplisit mengangkat nilai gotong royong sebagai pendekatan kultural yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat pedesaan di Ciamis. Nilai ini menjadi dasar dalam menyusun strategi manajemen internal, pola distribusi keuntungan, dan model kerja partisipatif dalam koperasi. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi semata, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dalam komunitas petani [13].

Berdasarkan analisis situasi di atas, program pengabdian ini dirancang dengan pendekatan partisipatif dan transformatif yang berorientasi pada pemberdayaan mitra secara menyeluruh. Pendekatan partisipatif menekankan pentingnya pelibatan aktif petani dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, sehingga kegiatan tidak bersifat top-down melainkan menjadi hasil dialog dan kesepakatan bersama. Sementara itu, pendekatan transformatif bertujuan tidak sekadar memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga membangun kesadaran kritis, kapasitas kolektif, serta struktur kelembagaan yang dapat menopang perubahan berkelanjutan dalam sistem usaha tani mereka [14].

Untuk mencapai tujuan tersebut, program akan dilaksanakan melalui lima tahapan utama yang saling terintegrasi dan disusun secara logis agar mampu menjawab permasalahan yang dihadapi oleh mitra:

1. Sosialisasi dan Pemetaan Kebutuhan Mitra

Tahap awal ini bertujuan membangun pemahaman bersama antara tim pelaksana dengan kelompok tani mengenai tujuan program, ruang lingkup kegiatan, serta harapan masing-masing pihak. Kegiatan ini mencakup dialog kelompok, observasi lapangan, dan penyusunan profil kelembagaan kelompok. Melalui kegiatan ini, akan dipetakan pula potensi dan tantangan internal kelompok, preferensi terhadap jenis pupuk non-subsidi yang dibutuhkan, serta kesiapan sosial dan administratif untuk membentuk

KUB.**2. Pelatihan Manajemen Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi**

Setelah kebutuhan mitra tergambarkan dengan jelas, tahap berikutnya adalah pemberian pelatihan yang difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola organisasi ekonomi berbasis koperasi. Materi pelatihan meliputi: struktur organisasi koperasi, peran pengurus dan anggota, sistem pengambilan keputusan partisipatif, pencatatan keuangan sederhana, pengelolaan stok barang, dan strategi distribusi internal. Pelatihan ini juga akan memperkenalkan prinsip-prinsip koperasi yang sejalan dengan nilai gotong royong dan keadilan sosial, agar nilai-nilai lokal dapat terintegrasi dalam praktik kelembagaan.

3. Pendampingan Pembentukan dan Legalisasi KUB

Tahap ini merupakan proses pendirian kelembagaan secara formal, yang mencakup penyusunan AD/ART, pembentukan struktur pengurus, pendaftaran legalitas kelembagaan ke dinas terkait (misalnya Dinas Koperasi dan UMKM), dan penyusunan rencana usaha awal. Pendampingan dilakukan secara intensif dengan melibatkan mitra dari sektor hukum atau notariat, agar proses legalisasi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dilakukan pula fasilitasi penyusunan dokumen-dokumen administratif seperti Nomor Induk Koperasi, NPWP, dan rekening kelembagaan.

4. Fasilitasi Akses Jaringan Distributor Pupuk Non-Subsidi

Setelah KUB terbentuk secara legal, tahap selanjutnya adalah menjembatani kelompok mitra dengan jaringan distributor pupuk non-subsidi yang dapat memasok produk dengan harga kompetitif dan kuantitas yang sesuai kebutuhan. Tim pengabdian akan membantu dalam negosiasi awal, penyusunan nota kesepahaman (MoU), dan pemetaan rantai pasok logistik. Kegiatan ini juga mencakup pelatihan teknis terkait pemilihan produk pupuk, manajemen stok, dan pengendalian mutu produk. Diharapkan melalui tahapan ini, kelompok memiliki saluran distribusi yang lebih stabil, transparan, dan tidak tergantung pada pengecer lokal.

5. Evaluasi dan Perencanaan Keberlanjutan Usaha

Evaluasi dilakukan secara periodik untuk menilai efektivitas kegiatan, tingkat partisipasi anggota, dan kinerja kelembagaan KUB. Evaluasi dilakukan secara kuantitatif (misalnya melalui indikator jumlah pembelian kolektif, jumlah anggota aktif, volume pupuk yang disalurkan) dan kualitatif (seperti wawancara mendalam dan diskusi kelompok). Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam menyusun rencana keberlanjutan usaha koperasi ke depan, termasuk perluasan usaha, diversifikasi produk, hingga replikasi model ke kelompok tani lain. Pada tahap ini juga akan dilakukan pemetaan potensi kolaborasi dengan pihak eksternal seperti BUMDes, dinas pertanian, maupun lembaga keuangan mikro.

Setiap tahapan dalam program ini akan melibatkan peran aktif dari kelompok tani, baik sebagai pelaksana, peserta pelatihan, maupun pengambil keputusan dalam pengembangan kelembagaan. Kegiatan juga akan mengikutsertakan tokoh masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya agar integrasi sosial dan kelembagaan dapat tercapai. Pendekatan yang digunakan bersifat fleksibel dan kontekstual, artinya metode dan bentuk intervensi akan disesuaikan dengan kondisi sosial-budaya setempat, daya serap kelompok, serta dinamika yang berkembang selama pelaksanaan program.

Dengan strategi ini, pengabdian diharapkan mampu menumbuhkan kemandirian ekonomi kelompok tani melalui koperasi yang dikelola secara partisipatif, serta memperkuat kohesi sosial berbasis nilai gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat pedesaan Indonesia.

Dengan intervensi ini, diharapkan kelompok tani Sawargi dapat membangun sistem distribusi pupuk mandiri yang efisien, adil, dan berkelanjutan, serta memperkuat posisi petani dalam rantai nilai pertanian. Keberhasilan program ini juga diharapkan menjadi model replikasi bagi kelompok tani lain di wilayah Kabupaten Ciamis dan sekitarnya, dalam membangun kemandirian ekonomi petani berbasis kelembagaan lokal dan semangat gotong royong [15].

II. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang secara sistematis, partisipatif, dan adaptif guna memastikan bahwa intervensi yang diberikan dapat menjawab permasalahan mitra secara kontekstual dan berkelanjutan. Metode yang digunakan menekankan kolaborasi aktif antara tim pelaksana dan kelompok mitra, dengan pendekatan transformatif yang tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan dan teknologi, tetapi juga pada perubahan struktur kelembagaan dan pola pikir kolektif. Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui lima tahapan utama: sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan dan evaluasi, serta perencanaan keberlanjutan program.

A. SOSIALISASI

Tahapan sosialisasi merupakan fondasi awal yang sangat penting untuk membangun pemahaman bersama dan kesepahaman antara tim pelaksana dan mitra sasaran. Dalam konteks ini, sosialisasi tidak hanya dimaknai sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai upaya membangun relasi sosial yang setara, saling percaya, dan partisipatif. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan tatap muka dengan anggota Kelompok Tani Sawargi, tokoh masyarakat, dan aparat desa. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan tujuan, manfaat, dan tahapan program pengabdian, sekaligus menggali ekspektasi, aspirasi, serta kekhawatiran dari mitra sasaran.

Pada tahap ini dilakukan pula pemetaan awal terhadap struktur sosial dan kelembagaan kelompok, jenis komoditas yang dibudidayakan, siklus musim tanam, serta masalah utama yang mereka hadapi terkait akses pupuk. Hasil pemetaan ini menjadi dasar dalam perancangan materi pelatihan, strategi pendampingan, dan pengembangan model kelembagaan. Metode yang digunakan dalam tahap ini meliputi diskusi kelompok terfokus (FGD), observasi partisipatif, dan wawancara semi-struktural dengan tokoh kunci. Tahap ini juga mencakup identifikasi potensi kader atau penggerak lokal yang dapat berperan sebagai fasilitator internal dalam proses pendampingan selanjutnya.

B. PELATIHAN

Setelah terbentuk pemahaman dan kesepahaman yang kuat melalui sosialisasi, tahapan selanjutnya adalah pelatihan sebagai sarana peningkatan kapasitas sumber daya manusia mitra. Pelatihan dirancang untuk membekali anggota kelompok tani dengan keterampilan dasar dalam mengelola kelembagaan ekonomi dan menjalankan usaha kolektif secara profesional. Materi pelatihan difokuskan pada aspek praktis, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan lapangan, dengan pendekatan pembelajaran orang dewasa (andragogi).

Topik pelatihan mencakup:

- ✓ Prinsip-prinsip dasar koperasi dan manajemen kelembagaan pertanian
- ✓ Penyusunan AD/ART dan struktur organisasi koperasi
- ✓ Pencatatan keuangan sederhana dan sistem pelaporan bulanan

- ✓ Strategi pembelian kolektif dan negosiasi harga
- ✓ Sistem distribusi pupuk yang adil dan efisien
- ✓ Penyusunan rencana usaha (business plan) dan analisis harga pokok penjualan (HPP)
- ✓ Etika kepemimpinan kolektif dan resolusi konflik internal

Pelatihan dilaksanakan dalam beberapa sesi terjadwal agar tidak mengganggu rutinitas bertani para peserta. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, simulasi kasus, diskusi kelompok, dan latihan praktis. Penilaian dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Kegiatan ini juga menghasilkan produk berupa modul pelatihan dan bahan ajar yang dapat digunakan untuk pelatihan lanjutan atau replikasi di kelompok tani lain.

C. PENERAPAN TEKNOLOGI

Teknologi yang diterapkan dalam program ini berfokus pada aspek manajerial dan kelembagaan, dengan pendekatan teknologi tepat guna yang sederhana namun fungsional. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan “teknologi” tidak terbatas pada perangkat keras, tetapi juga mencakup sistem, prosedur, dan alat bantu administratif yang mendukung kinerja kelembagaan ekonomi petani.

Komponen utama dari teknologi yang diterapkan antara lain:

- ✓ Sistem pencatatan keuangan berbasis spreadsheet (Excel atau Google Sheet) yang dapat dioperasikan oleh pengurus koperasi dengan literasi digital dasar. Format ini mencakup pencatatan arus kas, laporan stok pupuk, daftar anggota, dan catatan distribusi.
- ✓ Sistem distribusi pupuk berbasis kuota dan musyawarah, yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap anggota memperoleh pupuk sesuai kebutuhan tanam, dengan prinsip adil dan transparan.
- ✓ Dokumen SOP (Standard Operating Procedure) yang mengatur kegiatan operasional harian koperasi, seperti prosedur pembelian pupuk, mekanisme penyimpanan, hingga protokol pelaporan dan evaluasi bulanan.
- ✓ Template AD/ART koperasi yang telah disesuaikan dengan nilai-nilai lokal dan regulasi pemerintah.

Teknologi ini dirancang agar dapat dipelajari dan dioperasikan oleh pengurus KUB dengan dukungan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Keunggulan pendekatan ini adalah memungkinkan proses transisi dari praktik informal ke sistem kelembagaan formal secara bertahap dan tidak mengganggu keseharian petani.

D. PENDAMPINGAN DAN EVALUASI

Pendampingan merupakan kunci keberhasilan dari seluruh proses pengabdian. Pendampingan dilakukan secara intensif, adaptif, dan berbasis relasi dialogis antara tim pengabdian dan kelompok mitra. Model pendampingan yang digunakan bersifat *co-learning*, yaitu proses belajar bersama di mana pendamping dan petani sama-sama aktif mengevaluasi, merefleksi, dan memperbaiki proses kelembagaan yang sedang dibangun.

Pendampingan mencakup:

- ✓ Asistensi dalam proses legalisasi koperasi (akta notaris, pendaftaran ke dinas)

- ✓ Bimbingan teknis dalam penggunaan sistem pencatatan keuangan
- ✓ Fasilitasi pertemuan antara KUB dan distributor pupuk
- ✓ Review berkala terhadap kinerja pengurus dan sistem distribusi internal
- ✓ Mediasi apabila terjadi konflik atau ketidaksepahaman dalam organisasi

Evaluasi dilakukan secara berkala dan menggunakan pendekatan formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilaksanakan selama proses pendampingan berlangsung, untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai tujuan dan respons peserta positif. Evaluasi sumatif dilakukan pada akhir program untuk menilai capaian luaran dan dampak yang ditimbulkan. Metode evaluasi meliputi observasi lapangan, wawancara mendalam, review dokumen koperasi, serta survei kepuasan anggota.

Indikator evaluasi antara lain:

- ✓ Tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi
- ✓ Jumlah dan volume pupuk yang berhasil didistribusikan secara kolektif
- ✓ Keberfungsian sistem pencatatan dan pelaporan
- ✓ Tingkat kepercayaan anggota terhadap pengurus

E. *KEBERLANJUTAN PROGRAM*

Aspek keberlanjutan dirancang sebagai bagian integral dari program, bukan sebagai kegiatan tambahan di akhir. Keberlanjutan mencakup keberlangsungan kelembagaan, kontinuitas kegiatan, serta kemungkinan replikasi di kelompok tani lain. Strategi keberlanjutan program mencakup:

- ✓ Dokumentasi model kelembagaan dan SOP dalam bentuk buku panduan operasional KUB, yang dapat digunakan sebagai rujukan internal maupun bahan diseminasi ke wilayah lain.
- ✓ Penumbuhan kader internal (penggerak kelompok) yang telah dilatih dan mampu menjadi fasilitator lokal untuk kelangsungan kegiatan koperasi.
- ✓ Fasilitasi akses pembiayaan mikro dan dukungan kebijakan, dengan menjembatani KUB ke lembaga penyalur kredit usaha rakyat (KUR), Dinas Pertanian, dan CSR sektor swasta.
- ✓ Pembangunan jaringan antar-kelompok tani di wilayah sekitar agar tercipta ekosistem koperasi pertanian yang saling mendukung.

Sebagai langkah diseminasi, KUB hasil binaan akan dijadikan contoh dalam seminar lokal dan diusulkan sebagai mitra replikasi dalam program pemberdayaan lainnya. Keberhasilan program akan dievaluasi tidak hanya berdasarkan keberadaan kelembagaan, tetapi juga dari daya hidup dan kemampuan koperasi dalam menjawab kebutuhan anggotanya secara berkelanjutan.

Dengan pendekatan lima tahap ini—sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan & evaluasi, serta perencanaan keberlanjutan—program pengabdian ini diharapkan mampu menciptakan transformasi kelembagaan petani yang bukan hanya berfungsi sebagai saluran distribusi pupuk, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran sosial, ekonomi, dan kewirausahaan kolektif berbasis nilai-nilai lokal yang kuat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. **PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN KUB**

Hasil utama dari kegiatan pengabdian ini adalah terbentuknya Koperasi Usaha Bersama (KUB) Petani Sawargi sebagai kelembagaan ekonomi yang legal dan fungsional. Proses pendirian dilakukan melalui penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pemilihan pengurus, dan legalisasi di bawah naungan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ciamis. Keberadaan KUB memberikan payung hukum bagi kelompok tani dalam melakukan transaksi kolektif, mengakses pembiayaan, dan menjalin kemitraan usaha. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hakim (2020) yang menunjukkan bahwa kelembagaan koperasi mampu meningkatkan posisi tawar petani dalam rantai nilai pertanian.

B. **PENINGKATAN KAPASITAS MANAJERIAL DAN LITERASI KEWIRAUSAHAAN**

Melalui serangkaian pelatihan, anggota kelompok tani memperoleh keterampilan dasar dalam manajemen kelembagaan, pencatatan keuangan sederhana, serta penyusunan rencana usaha. Evaluasi menggunakan pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman anggota terhadap prinsip tata kelola koperasi dan strategi usaha kolektif. Hal ini mengonfirmasi pentingnya pendekatan *capacity building* dalam pemberdayaan kelembagaan petani, sebagaimana disampaikan oleh Saptana (2020).

C. **FASILITASI AKSES KE DISTRIBUTOR PUPUK NON-SUBSIDI**

Pendampingan juga berhasil menjembatani KUB dengan jaringan distributor pupuk non-subsidi di wilayah Priangan Timur. Meskipun kerja sama formal masih dalam tahap negosiasi, langkah awal ini menjadi fondasi penting untuk mengurangi ketergantungan petani pada pengecer lokal dengan harga tinggi. Secara praktis, pembelian kolektif berpotensi menurunkan harga pupuk per satuan sekaligus menstabilkan pasokan sesuai musim tanam. Kondisi ini memperkuat hasil temuan Widodo (2018) yang menyatakan bahwa akses pasar melalui kelembagaan mampu meningkatkan efisiensi usahatani.



Gbr 1. Dokumentasi foto bersama

D. **IMPLEMENTASI SISTEM TATA KELOLA TRANSPARAN**

KUB telah memiliki rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengadaan dan distribusi pupuk, serta sistem pencatatan berbasis spreadsheet sederhana. Walaupun masih dalam tahap adaptasi, pengurus mulai menerapkan pencatatan transaksi dan stok secara kolektif. Penerapan sistem ini bertujuan membangun transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan anggota, sebagaimana ditekankan oleh Prabowo (2021).

E. INTEGRASI NILAI GOTONG ROYONG SEBAGAI FONDASI SOSIAL

Nilai gotong royong diintegrasikan ke dalam praktik kelembagaan melalui musyawarah rutin, kerja bakti koperasi, serta partisipasi sukarela anggota dalam kegiatan distribusi pupuk. Aktualisasi nilai lokal ini memperkuat kohesi sosial sekaligus menjadi pembeda model kewirausahaan sosial yang dikembangkan. Temuan ini sejalan dengan Fitriani (2017) yang menegaskan bahwa gotong royong merupakan teknologi sosial penting dalam memperkuat keberlanjutan kelembagaan desa.

F. CAPAIAN LUARAN

Sampai dengan tahap laporan ini, beberapa luaran telah terealisasi dengan capaian 70%. Luaran wajib berupa Hak Cipta (HaKI) telah memperoleh status *granted*, video kegiatan telah dipublikasikan, artikel jurnal nasional telah disubmit, dan artikel media massa berada pada tahap draft. Capaian ini menunjukkan konsistensi antara rencana dan realisasi luaran, meskipun terdapat beberapa kendala administratif yang menyebabkan keterlambatan pada luaran publikasi.

IV. DISKUSI

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan partisipatif mampu menjawab tantangan struktural dan kultural yang dihadapi petani kecil, khususnya terkait akses pupuk, kelembagaan ekonomi, dan penguatan nilai sosial. Program ini tidak hanya menghasilkan kelembagaan formal berupa KUB, tetapi juga membangun kapasitas anggota dan merevitalisasi nilai gotong royong sebagai basis kewirausahaan sosial.

Secara akademik, model yang dikembangkan memperkuat argumen bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh intervensi teknis, tetapi juga oleh integrasi aspek sosial-budaya. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi pada pengembangan konsep kewirausahaan sosial berbasis kelembagaan lokal yang dapat direplikasi pada komunitas petani di wilayah lain.

V. KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat ini berhasil mendorong terbentuknya Koperasi Usaha Bersama (KUB) Petani Sawargi sebagai kelembagaan ekonomi yang legal dan fungsional, meningkatkan kapasitas manajerial anggota melalui pelatihan, memfasilitasi akses ke distributor pupuk non-subsidi, serta

mengimplementasikan tata kelola berbasis transparansi dan nilai gotong royong. Integrasi aspek teknis dan sosial-budaya menjadikan kegiatan ini tidak hanya menyelesaikan persoalan akses pupuk, tetapi juga membangun model kewirausahaan sosial berbasis kelembagaan lokal yang berkelanjutan. Capaian luaran berupa HaKI, artikel jurnal nasional (submitted), publikasi video, dan draft artikel media massa menunjukkan progres positif sesuai target, sekaligus memperkuat kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan ekonomi petani di tingkat desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Siliwangi atas dukungan pendanaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan program ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Kelompok Tani Sawargi, Dusun Ancol II, Desa Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, yang telah berpartisipasi

aktif dan menjadi mitra utama dalam setiap tahapan kegiatan. Apresiasi disampaikan pula kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ciamis atas pendampingan proses legalisasi kelembagaan, serta seluruh pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan hingga tercapainya luaran pengabdian ini

REFERENSI

- [1] Suryana, A. "Reformasi Sistem Subsidi Pupuk." *Jurnal Agro Ekonomi*, vol. 29, no. 1, 2011.
- [2] Haryono, T. "Kebijakan Subsidi dan Ketahanan Pangan." *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, vol. 32, no. 2, 2014.
- [3] Setyowati, D. "Aksesibilitas Petani terhadap Pupuk." *Jurnal Penyuluhan*, vol. 12, no. 1, 2016.
- [4] Maulana, A. "Analisis Efisiensi Usahatani Padi." *Jurnal Agribisnis*, vol. 9, no. 2, 2017.
- [5] Nugroho, B. "Distribusi Pupuk dan Ketimpangan Akses." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, vol. 6, no. 3, 2018.
- [6] Susilowati, S.H. "Karakteristik Petani Kecil di Indonesia." *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, vol. 12, no. 4, 2019.
- [7] Syahyuti. "Kelembagaan Petani dalam Pembangunan Pertanian." *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, vol. 31, no. 1, 2013.
- [8] Hakim, R. "Peran Koperasi dalam Rantai Nilai Pertanian." *Jurnal Agrisep*, vol. 20, no. 1, 2020.
- [9] Widodo, A. "KUB dan Kemandirian Ekonomi Petani." *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, vol. 7, no. 2, 2018.
- [10] Saptana, R. "Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Petani." *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, vol. 14, no. 1, 2020.
- [11] Prabowo, A. "Tata Kelola Koperasi yang Akuntabel." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 10, no. 2, 2021.
- [12] Darmansyah. "Model Pendampingan Berbasis Partisipatif." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 6, no. 1, 2019.
- [13] Fitriani, D. "Nilai Sosial Gotong Royong dalam Masyarakat Desa." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 5, no. 3, 2017.
- [14] Munandar, M. "Pendekatan Partisipatif dalam Pengembangan Usaha Tani." *Jurnal Agrisains*, vol. 4, no. 1, 2021.
- [15] Lestari, I. "Model Kelembagaan Petani Berbasis Lokal." *Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Wilayah*, vol. 8, no. 2, 2022